BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena yang paling sering muncul dari suatu negara yang kaya akan etnis adalah terjadinya konflik-konflik *internal*. Kekayaan etnis suatu negara bisa menjadi salah satu faktor yang paling dominan yang menyebabkan timbulnya disintegrasi yang akhirnya melahirkan konflik ethno-nasional. Konflik ini biasanya melibatkan gerakan-gerakan *irredentist* (pencaplokan), *secessionist* (pemisahan), atau *anti colonial*. Ada tiga criteria yang menjadi dasar konflik ethno, antara lain :

(1) konflik itu terjadi di dalam batas-batas wilayah suatu negara

(2) salah satu pihak yang berkonflik adalah pemerintah yang sedang berkuasa

(3) pihak oposisi mampu memberikan perlawanan yang terus menerus

(Http//hikmat.atspace.org/arsip/mini_kata/tulisan/weber.html).

Konflik ethno-nasional yang tidak memenuhi kriteria diatas dapat dianggap sebagai kekerasan komunal (*communal violence*) dan perang internal wilayah. Dalam hal ini konflik intra state dibagi ke dalam kelompok-kelompok berbasis ethnis, agama, dan ideologi. Kelompok-kelompok ini biasa disebut dengan "*ethno-nasionalism"* (nasionalisme ethnis).

Semenjak Perang Dunia II telah banyak konflik intra state yang terjadi di berbagai negara. Biasanya konflik ethnis berkobar disebagian negara-negara miskin

yang akibatnya semakin memperparah kemiskinan negara–negara tersebut dikarenakan hancurnya basis-basis ekonomi yang pada dasarnya memang telah rapuh dan akhirnya menimbulkan pernderitaan berkepanjangan terhadap negara tersebut.

Sebagaimana dijelaskan diatas, konflik ethno-nasionalis atau konflik ethno-politis biasanya terjadi di negara-negara miskin, tetapi konflik itu pun terjadi di Rusia yang merupakan salah satu negara besar. Kondisi masyarakat Rusia yang sangat *multi ethnis* berpotensi besar menimbulkan ancaman disintegrasi di republik Federasi Rusia. Terlebih setelah jatuhnya Uni Soviet, konflik- konflik yang selama ini tersembunyi mencuat ke atas permukaan. Berbagai gerakan separatis bermunculan dan mulai mengancam integritas wilayah Rusia, salah satunya konflik Chechnya.

Keruntuhan Uni Soviet di tahun 1991 telah mewariskan berbagai masalah nasional bagi negara – negara bagian bekas negara adidaya tersebut. Dan permasalahan yang lebih kompleks lebih dirasakan oleh Rusia dimana proses transisi perubahan RSFSR (*Republik Soviet Sosialis Federasi Rusia*) menjadi Federasi Rusia menyisakan persoalan yang kapan pun bisa menjadi bom waktu di masa mendatang. Gerakan separatisme yang muncul dengan memanfaatkan sentimen etnis, agama maupun ketidakadilan bisa timbul kapan pun di republik-kesukuan yang ada di Rusia, salah satunya adalah konflik Chechnya.

Konflik Chechnya merupakan satu contoh dari gerakan separatisme dimana simbol – simbol agama dan etnis menjadi bagian integral dari gerakan tersebut. Konflik antara Rusia-Chechnya sebenarnya telah dimulai semenjak abad IX sampai dengan

abad XII, hanya saja mulai semakin menarik semenjak runtuhnya imperium Uni Soviet. Ada berbagai faktor yang menjadi alasan mengapa konflik tersebut bisa terjadi. Selain faktor politik, ekonomi, dan juga ideologi, adanya dendam lama bangsa Chechen terhadap tindakan politik dan militer yang dilakukan oleh pemerintah Uni Soviet menjadi alasan dasar bangsa Chechen untuk bangkit melawan. Misalnya, kebijakan Uni Soviet untuk melakukan pembersihan etnis dan memindahkan bangsa Chechen secara paksa ke berbagai penjuru Asia Tengah, termasuk ke Siberia yang menyebabkan kematian seperempat populasi Chechnya.

Gerakan pembebasan itu pertama kali dipimpin oleh Imam Mansyur pada tahun 1785 – 1791. Gerakan pembebasan tersebut bermula dari ekpansionisme yang dilakukan pada masa kekaisaran Peter Agung dan kedatangan kaum Cossak, orang-orang yang berlatar belakang militer dan ahli perang dari Rusia, mendorong bangsa Chechen untukbangkitmelawan. Gerakan tersebut sempat padam karena tertangkapnya Imam Mansyur, namun bergejolak kembali pada pertengahan abad XIX dibawah pimpinan Imam Syamil pada tahun 1834 sampai 1859 dengan kekalahan telak dipihak Syamil dan Chechnya akhirnya dikuasai oleh pasukan Rusia dan akhirnya sedikit demi sedikit perjuangan bangsa Chechen mulai surut. Hampir sepanjang sejarah bangsa Chechen diwarnai dengan darah, apa yang selama ini terjadi disana lebih merupakan berbagai permasalahan yang tidak terselesaikan secara adil, baik saat Chechnya berada di masa Imperium Rusia, masa pemerintahan Uni Soviet, maupun pada masa pemerintahan Federasi Rusia saat ini.

Berbagai macam kebijakan yang dibuat pada tiga masa pemerintahan tersebut tak ada satupun yang menguntungkan bangsa Chechen, tetapi lebih merupakan kebijakan yang sangat *diskriminatif*. Terlebih dalam upaya mematikan berbagai perjuangan bangsa Chechen, tiga pemerintahan tersebut cenderung memilih jalur-jalur kekerasan dibandingkan jalur perdamaian. Misalnya, pada saat masa Kekaisaran Tsar Peter Agung yang memiliki karakter ekspansif, bangsa Chechen dideportasi ke perbatasan Turki Utsmani. Kebijakan yang sangat merugikan tersebut merupakan hasil persetujuan Tsar dengan Kekaisaran Ottoman Turki, dimana akibatnya sebagian besar bangsa Chechen terpaksa keluar meninggalkan tanah kelahirannya sendiri sementara tanah-tanah mereka diberikan kepada kaum Cossak, kaum yang merupakan pasukan elite-nya Rusia saat itu.

Dibawah perintah Stalin, pada 23 Februari 1944 tentara Rusia memasuki Chechnya dan memulai pembersihan etnis. Negeri tersebut dikosongkan dan sekitar 425.000 bangsa Chechen dan Ingushetian dipindahkan ke berbagai wilayah di Asia Tengah, termasuk Siberia guna kerja paksa dan separuh dari jumlah itu meninggal di pengungsian. Selain itu, hak-hak beragama mereka pun ditindas, bangsa Chechen yang mayoritas beragama islam tidak diperbolehkan melakukan berbagai bentuk kegiatan agama. Seakan tidak cukup, pemerintah Rusia melakukan ekspoitasi sumber daya alam yang ada di bumi Chechnya yang pada dasarnya sangatlah kaya akan hasil tambang, terutama minyak bumi.

Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 seharusnya membawa angin segar

bagi Chechnya untuk lepas dari Rusia. Hampir semua negara-negara bagian bekas Uni Soviet menjadi negara merdeka dan berdaulat. Kebijakan *Glasnot* dan *Perestroika* yang diteapkan Mikhael Gorbachev justru memperkuat gerakan-gerakan pemberontakan di banyak republik Uni Soviet. Konflik-konflik yang selama ini tersembunyi, mulai muncul menjadi konflik terbuka, termasuk konflik Chechnya. Namun sayangnya, ketika beberapa negara bagian bekas Uni Soviet mendapat sedikit kemudahan dalam proses pelepasan diri dari Uni Soviet, Chechnya justru dipersulit.

Perang Chechnya pertama meletus pada tahun 1994 ketika Moskow tidak lagi bisa membendung keinginan Chechnya untuk melepaskan diri dari Federasi Rusia. Awalnya, Boris Yeltsin yang saat itu merupakan pimpinan tertinggi Rusia berlaku lunak dengan mengeluarkan maklumat pada 15 November 1994 yang berisi agar penduduk Chechnya tidak mendukung gerombolan separatis yang dipimpin Dzokhar Dudayev, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat setempat. Akibatnya, perang pun tak lagi dapat dielakkan, Moskow menyerang Grozny dan menghancurkan berbagai infra-struktur Chechnya dan konflik berdarah itupun menelan banyak korban jiwa. Dalam perang pertama ini, kekalahan telak dialami oleh Rusia dan akhirnya memilih mundur dari Chechnya. Akibat banyaknya korban yang jatuh dari kalangan sipil, Moskow memutuskan mengambil langkah diplomatis dengan menanda-tangani Perjanjian *Kasavyurt* pada tahun 1996.

Rusia sepakat untuk memberikan status otonomi kepada Chechnya dan

membahas status Chechnya dalam jangka waktu 5 tahun dan untuk sementara waktu, bumi Chechnya mendapat kedamaian. Namun, ketenangan itu terusik dengan beberapa insiden yang terjadi di Republik tetangga Chechnya, Dagestan yang dilakukan pasukan Basayev memicu perang Chechnya kembali. Insiden tersebut dijdikan Rusia sebagai alasan untuk kembali menggempur Chechnya. Dan pada Oktober 1999, dengan dalih ketidakmampuan Aslan Maskhadov mengendalikan kelompok Basayev, Perdana Menteri Vladimir Putin kembali menerjunkan lebih dari 80.000 pasukan Rusia untuk kembali ke Chechnya dan berkobarlah Perang Chechnya II.

Ketika Putin terpilih sebagai presiden Rusia, permasalahan separatis Chechnya menjadi salah satu prioritas utamadalam agenda pemerintahannya. Putin memberlakukan kebijakan yang luar biasa represif terhadap gerakan separatis Chechnya. Jika pada masa-masa sebelum Putin menjadi presiden jalan damai masih bisa diusahakan tetapi pada masa Putin telah menjadi presiden, jalur-jalur tersebut ditutup dan diganti dengan jalur kekerasan. Kebijakan tersebut itu dipertegas dengan pernyataan Putin bahwa *"tidak ada pembicaraan damai dan kompromi bagi separatis Chechnya"*

(www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A27550-2004Sep16.html).

Akibatnya, selama perang itu berlangsung sampai sekarang lebih dari 180.000 warga sipil tewas, sementara 350.000 warga kehilangan tempat tinggal. Sementara dari pihak Rusia, lebih dari 3.100 tentara Rusia tewas selama konflik

berlangsung (www.jamestown.org).

Pada kepemimpinan di pegang oleh VladimirPutin, khususnya di era 2000 - 2004 permasalahan separatisme yang terjadi di Chechnya menjadi agenda utama dalam pemerintahannya. Apalagi di rentan tahun tersebut kelompok separatis menggunakan kosep baru untuk menyerang Rusia, seperti berbagai bom bunuh diri dan penyanderaan *instansi* - *instansi* publik milik pemerintah.

Berbekal pengalaman menjadi perdana menteri pada era Boris Yelstein, Putin banyak mengambil pelajaran bagaimana cara menghadapi kelompok gerakan separatis Chechnya, salah satunya menolak untuk mengadakan perundingan kepada kelompok separatis karena Putin tahu hal tersebut sering dilakukan oleh Boris tetapi hasil yang dicapai nihil. Pada tanggal 20 April tahun 2000 ada tawaran gencatan senjata oleh Mashkadov, yang ditolak Rusia dengan alasan perlawanan mereka lebih kepada melindungi para kriminal dan penguasa setempat yang mangkir kepada pemerintahan Rusia. Dan pada bulan Juni di tahun yang sama, terjadi lebih banyak kontak senjata, serangan bom bunuh diri, dan gempuran dari pasukan gerilya Chechnya yang menunjukkan perjuangan mereka masih panjang (http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Chechnya).

Melihat situasi yang tidak lebih stabil maka Putin mencoba masuk ke Chechnya melalui celah politik di Chechnya, pada bulan Maret tahun 2003 disetujui diadakan referendum untuk menentukan bagaimana Chechnya merdeka sebagai sebuah negara bagian dan akan bergabung ke dalam Federasi Rusia, yang akhirnya

menyetujui konstitusi baru bagi rakyat Chechnya. Bulan Oktober di tahun yang sama Ahmad Kadirov, seorang kunci bagi Rusia untuk tetap berkuasa di Chechnya, terpilih menjadi presiden. Ahmad Kadirov merupakan kaki tangan Rusia di Chechnya yang diperangi oleh kelompok separatis Chechnya karena dianggap sebagai orang yang murtad dan memerangi Islam.

Semenjak adanya kelompok di Chechnya yang pro Rusia, Chechnya terpecah menjadi 2 kubu, yang pertama adalah kubu yang *pure* menginginkan Chechnya menjadi sebuah Negara yang berdaulat pimpinan Shamil Bassayev yang dalam setiap aksinya selalu bertindak radikal serta kubu yang lebih moderat atau lebih memilih jalan damai dalam menyelesaikan permasalahan yang dipimpin Ahmad Kadyrov, negoisasi selalu dikedepankan bukan jalan perang yang menjadi solusi utama, hal ini dipandang kelompok separatis Chechnya dan dunia internasional sebagai kelompok buatan Rusia untuk memegang kendali pemerintahan di Chechnya.

Kejadian yang paling *fenomenal* di dunia Internasional yang pernah dilakukan kelompok separatis pada era Vladimir Putin adalah ketika kelompok separatis Chechnya melakukan aksi penyanderaan *instansi* – *instansi* publik seperti penyanderaan di *Theatre Moscow* dan di sekolah nomor 1 di Besslan Osseatia Selatan. Aksi ini dilancarkan sebagai aksi balasan atas apa yang militer Rusia lakukan di Chechnya, sadar bahwa kelompok separatis tak bisa melawan secara *face to face,* maka kelompok separatis ini melakukan aksi bom bunuh diri dan melakukan penyanderaan *instansi* public agar Rusia menarik mundur pasukannya dari Chechnya.

Tidak hanya sampai disitu usaha yang dilakukan separatis Chechnya, karena kelompok ini berdasarkan Islam maka kelompok separatis Chechnya ini juga memanfaatkan kelompok radikal Islam lainnya di beberapa negara seperti Afganistan, Degestan, maupun kelompok Wahabi yang memberi bantuan dana maupun pasukan.

Kelompok separatis Chechnya tidak pernah berhenti dalam melakukan aksi pemisahan hingga pemerintah Rusia sendiri kewalahan, pemerintah Rusia di era Vladimir Putin mengambil sikap yang keras dan cenderung melakukan pendekatan militer untuk mengatasi kelompok separatis Chechnya, sampai akhrinya mendapat kecaman dari berbagai pihak baik dari luar Rusia maupun dari dalam Rusia sendiri. PBB maupun kelompok aktivis HAM di Rusia mengecam tindakan Vladimir Putin yang jauh dari nilai – nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Bahkan wartawan lokal yang selalu mengkritisi pemerintahan Putin menjadi korban bukti kediktatoran Putin.

Bagi Vladimir Putin penyelesaian permasalahan Chechnya hanya ada dua, yaitu berdamai atau perang. Jika pilihan damai diambil, keuntungannya adalah anggaran pengeluaran tidak terlalu besar. Kerugiannya, proses tersebut terlalu lama, tidak ada jaminan akan dicapai solusi terbaik bagi kedua belah pihak, terlebih jika mengingat setelah perjanjian *Kvasayurt* ditandatangani, pembahasan status Chechnya selalu menemui jalan buntu. Putin mengkhawatirkan efek domino yang mungkin terjadi di subyek-subyek Federasi yang ada di Kaukakus Utara, jika persoalan Chechnya tidak segera diatasi.

Jika pilihan represif diambil, keuntungannya, situasi keamanan di wilayah

Kaukakus Utara, khususnya Chechnya akan lebih stabil, yang nantinya akan mempercepat pemulihan ekonomi Rusia, mengingat di wilayah tersebut terdapat ladang dan jalur pipa minyak dan gas yang akan sangat menguntungkan Rusia, terlebih dengan adanya proyek *Caspian Oil Pipeline* yang sedang digarap Rusia dengan beberapa negara lain. Putin pun menilai militer Rusia sekarang ini sudah jauh lebih baik dan lebih siap, dimana Putin yakin kemenangan akan diperoleh oleh Rusia. Keyakinan Putin tersebut tidak salah, dikarenakan adanya dukungan dari pasukan militer Rusia terhadap kebijakan *represif* yang diambil Putin.

Rusia dibawah pimpinan Vladimir Putin enggan melakukan pendekatan yang lebih *soft* karena telah terbukti tidak berpengaruh terhadap kestabilan keamanan di wilayah Rusia dan Chechnya. Maka Vladimir Putin mengambil langkah militer dalam menyelesaikannya. Banyak hal yang dilakukan Putin yang menarik mata dunia untuk melihat lebih dalam sepak terjang militer Rusia. Kebijakan Putin dalam melumpuhkan petinggi kelompok separatis Chechnya guna meminimalisir aksi separatisme, jelas hal itu melanggar hak asasi manusia, belum lagi cara penyelesaian Putin dalam mengatasi penyanderaan kelompok separatis Chechnya di *theatre Moscow* dan di Sekolah Besslan, dimana tindakan militer yang membabi buta dengan tujuan melumpuhkan para penyandera mengakibatkan banyaknya jumlah korban tewas dari sandera itu sendiri.

Rusia sangat ingin mempertahankan Chechnya dikarenakan ada beberapa factor seperti, pemerintah Rusia khawatir akan terjadinya efek *domino.* Seperti yang

diketahui ikatan *religi* diwilayah kaukasus sangatlah kuat, bila Chechnya dilepas oleh Rusia maka bukan tidak mungkin akan menambah daftar panjang Negara yang merdeka dari Rusia.

Tanah Chechnya memiliki daya tarik tersendiri bagi Rusia dengan alam yang penuh dengan kandungan minyak, mampu menghasilkan 4,2 juta ton minyak mentah serta 18 juta ton minyak hasil sulingan per tahunnya, serta menjadi jalur pipa minyak antara Baku (Azerbaijan) dengan Novorossisk (Rusia) (www.hartford-hwp.com/archives/63/056.html).

Mempertahankan Chechnya juga merupakan gengsi bagi Vladimir Putin, *legitimasi* pemerintahan Putin akan dinilai gagal bila konflik Chechnya terus mencuat begitu juga sebaliknya, Putin akan dinilai berhasil bila konflik Chechnya bisa diselesaikan atau paling tidak dapat diredam. Untuk itu Chechnya dipertahankan sebisa mungkin demi menjaga *legitimasi* pemerintahan Putin.

Permasalahan ekonomi sempat melanda Rusia karena biaya perang melawan kelompok separatis Chechnya tidak sedikit,masalah ini disiasati Putin dengan baik, seperti menerapkan kewajiban pajak kepada setiap Negara bagian dan para oligarki serta pengusaha besar. Cara seperti ini telah meningkatkan pendapatan regional sebesar 20% dan peningkatan GDP dari $ 70006 pada tahun 2000 menjadi $ 90021 pada 2004 (IMF Country Report No. 05/379: 2005). Kenaikan minyak bumi dan gas juga membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi Rusia.

Merupakan suatu kebetulan atau bukan di Chechnya-lah tersimpan salah satu cadangan minyak terbesar di Rusia serta jalan menuju Laut Kaspia, yang merupakan situs cadangan minyak bumi terbesar di dunia. Karena beberapa faktor inilah Rusia era Putin kembali melancarkan serangan ke Chechnya membawa isu integritas wilayah Rusia yang terancam serta mengacuhkan kecaman dunia barat demi mempertahankan Chechnya dari gerakan separatis Chechnya.

Dengan demikian peneliti mengukuhkan untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Upaya Rusia dalam menangani gerakan separatis di Chechnya pada era Vladimir Putin.(2000-2005)"**

Ketertarikan penulis terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Interasional antara lain:

1. Diplomasi HI di Eropa, dimana dalam penelitian ini terletak di kawasan Eropa dan mata kuliah ini telah memberikan pemetaan mengenai diplomasi di kawasan Eropa khususnya di wilayah Rusia - Chechnya.
2. *War and Peace*, mata kuliah ini membantu peneliti dalam memberikan gambaran mengenai dinamika social dan politik yang terjadi di negara – negara dunia.
3. Hukum Internasional, mata kuliah ini membantu peneliti dalam memberikan gambaran mengenai beberapa pelanggaran hukum Internasional yang terjadi di wilayah Rusia dan Chechnya dalam upaya Rusia menangani konflik separatis Chechnya.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Upaya – upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Rusia dalam mengatasi separatis Chechnya?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Rusia dalam mengatasi gerakan separatis Chechnya?
3. Bagaimana prospek hubungan Rusia – Chechnya kedepannya?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas maka, peneliti mencoba mengkaji latar belakang masalah antara Rusia dan Chechnya serta meneliti kebijakan yang sudah dikeluarkan Presiden Rusia Vladimir Putin pada era 2000-2005 dimana pada masa itu Putin mngeluarkan kebijakan *represif* yang membuat kondisi di Chechnya – Rusia menjadi stabil.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, didapat rumusan masalah sebagai berikut: **"Upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Rusia di era kepemimpinan Vladimir Putin untuk menghadapi gerakan separatis Chechnya?"**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Secara garis besar tujuan penulisan ini lebih diutamakan pada kecenderungan kebijakan represif yang lebih dipilih Rusia dalam menghadapi gerakan separatis Chechnya. Namun, agar lebih terperinci, tujuan penulisan ini difokuskan pada :

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Rusia dalam mengatasi separatis Chechnya?
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Rusia dalam mengatasi gerakan separatis Chechnya.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana prospek hubungan Rusia – Chechnya kedepannya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, untuk memperkaya khasanah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kejahatan intenasional, khususnya terorisme dan bagaimana peranan organisasi regional menangani dan menanggulangi kejahatan lintas batas negara tersebut.
2. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.

3. Kegunaan Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan informasi dan pembelajaran bagi para penstudi masalah-masalah internasional khususnya yang terkait dengan topik penelitian yang dibahas kali ini, dan khususnya dapat berguna juga bagi peneliti sendiri untuk menambah informasi dan pengetahuan permasalahan internasional.
4. Untuk memberikan konstribusi aplikatif bagi teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh dan dipelajari selama ini dan relevansinya dengan realita yang terjadi dilapangan.

1.4 Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional

1.4.1 Kerangka Pemikiran

Dalam membahas beberapa upaya yang dilakukan Rusia untuk menangani gerakan separatis di Chechnya maka peneliti mencoba untuk mengedepankan beberapa teori dalam ilmu hubungan internasional yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Terdapat alasan kuat yang diutarakan *Sorensen* mengapa kita sebaiknya mempelajari Hubungan Internasional.

"adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi dalam komunitas politik yang terpisah, atau Negara – Negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama – sama Negara – Negara tersebut membentuk system internasional yang akhirnya menjadi system global" (Jackson dan Sorensen, 2005:2)

Hubungan Internasional berlangsung sangat dinamis, dimana berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial manusia dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan (alam). Pada awal proses perkembangannya, sejumlah pakar berpendapat bahwa ilmu Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar negara. Mengutip dari pendapat Schwarzenberger bahwa ilmu Hubungan Internasional merupakan bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*). Jadi ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya seperti misalnya perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi),pariwisata, olimpiade (olah raga), atau pertukaran budaya (*cultural exchange*) (Perwita dan Yani, 2005 : 1).

McClelland dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional juga berpendapat dalam buku Perwita dan Yani bahwa:

"Hubungan Internasional adalah sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia" (2005:4).

Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan:

"Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat

internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar"(2005: 3-4).

Karena hal-hal tersebut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

"Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (2005: 7-8).

Kajian hubungan internasional mencakup banyak aspek, bahwa hubungan internasional juga meliputi transaksi ekonomi, penggunaan kekuatan militer dan diplomas baik secara umum maupun khusus, sehingga dalam perkembangannya mengarah ke arah kegiatan – kegiatan seperti perang, bantuan kemanusiaan, perdagangan internasional dan investasi, turisme, dan lainnya, hubungan internasional juga mempelajari fenomena politik internasional yang meliputi keputusan – keputusan yang dibuat oleh negara untuk mempengaruhi negara – negara lain. Sehingga dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian ekonomi khususnya ekonomi internasional merupakan bagian dari studi hubungan internasional.

Rusia sendiri memiliki alasan untuk tetap mempertahankan Chechnya sebagai Negara bagian federasi Rusia. Tindakan Represif pun dijalankan demi terciptanya keamanan nasional. Jurgen Habermas, seorang filsuf jerman mengatakan bahwa

Represif merupakan lawan dari deliberatif. Deliberatif berarti menimbang-nimbang, konsultasi atau musyawarah. Sedangkan Represif merupakan kekuasaan yang menindas, memaksakan kehendak serta perundang-undangan kepada masyarakat (Hardiman, 2007;112 -169).

Hal tersebut bisa berupa penyiksaaan atau penghambatan terhadap individu atau kelompok dengan alasan politik, terutama sekali bertujuan untuk membatasi atau mencegah kemampuan mereka untuk mengambil bagian dari kehidupan politik masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keamanan Nasional adalah suatu keadaan negara atau bangsa yang aman, tentram, dan bebas dari rasa takut/khawatir, dari ancaman dan gangguan.

Definisi Keamanan Nasional sendiri bukan hanya mencakup masalah keamanan secara mental tetapi juga secara fisik. Keamanan Nasional yang berorientasi dalam negeri atau internal, biasanya identik dengan Bidang Pertahanan

Pada awalnya definisi keamanan nasional diartikan sebagai upaya yang bertujuan mempertahankan integritas teritori suatu negara dan kebebasan untuk menentukan bentuk pemerintahan sendiri, namun dengan perkembangan global dan semakin kompleksnya hubungan antara negara serta beragamnya ancaman yang dihadapi oleh negara-negara didunia, maka rumusan dan praktek penyelenggaraan keamanan cenderung dilakukan secara bersama-sama *(collective security)* menjadi acuan penting negara-negara didunia.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan keamanan bersama *(collective security)* tidak hanya dilakukan hanya untuk menjaga kedaulatan negara tetapi juga

menjaga keamanan warga negara. Konsep keamanan yang berorientasi kepada negara mulai bergerak menuju suatu pemikiran yang mengembangkan gagasan keamanan bagi warga negaranya. Kepedulian terhadap keselamatan manusia semakin menjadi penting. Human security menjadi isyu keamanan yang mendapatkan perhatian banyak kalangan.

Gagasan Human Security nampak lebih jelas dalam laporan UNDP mengenai *Human Development Report of the United Nations Development Program* pada tahun 1994. Namun sesungguhnya gagasan atau pengertian Human Security mulai menjadi perdebatan setelah perang dingin berakhir. Salah satu sumber penting yang memunculkan human security adalah perdebatan tentang gagasan mengenai perlucutan senjata dan pembangunan yang banyak terjadi di berbagai forum di PBB dalam rangka merespon perlombaan senjata pada era perang dingin. Demikian pula kegiatan dari beberapa komisi independen seperti Komisi Brandt (*The Brandt Commission*), Komisi Bruntland *(The Brundland Commission)* dan Komisi Penakbiran Global (*The Commission on Global Governance*) membantu merubah fokus analisa keamanan nasional atau keamanan negara menjadi keamanan untuk warga negara (kadang-kadang disebut pula *The Security of the People atau Societal Security*).

Respon masyarakat internasional akhir-akhir ini terhadap tantangan *human security* menunjukkan bahwa mereka peduli dengan situasi krisis yang dapat mengakibatkan kelangsungan hidup dan kesejahtraan masyarakat menjadi taruhan.

Human security melindungi eksistensi anggota masyarakat, termasuk anak-anak, warga sipil di wilayah perang, minoritas etnis dan lain sebagainya dari berbagai jenis kekerasan.

Seperti yang diungkapkan Owen *"*Keamanan internasional terdiri dari kebijakan yang diambil oleh negara-negara dan organisasi internasional, seperti PBB, untuk menjamin kelangsungan hidup bersama dan keselamatan.*"* (Owen, 2004;95).

Negara pasti terus menjaga keamanan nasionalnya dengan systemnya masing – masing. Sistem keamanan terhadap kegiatan yang bersumber kekuatan luar negeri disebut pertahanan negara dan umumnya bersifat serangan dengan kekuatan militer oleh negara lain (Suryohadiprojo, 2005; 132).

Konflik Rusia Chechnya merupakan perang yang sudah lama ada. Perang ini sudah menewaskan banyak warga sipil. Konflik memiliki teori tersendiri, seperti Menurut Michel E. Brown, menyebutkan beberapa alasan mengapa konflik internal penting untuk dilakukan tidak hanya dalam studi ilmu politik tetapi juga dalam kurikulum Hubungan Internasional, yaitu;

1. Pertama, konflik internal telah merebak ke banyak negara dan menimbulkan aksi-aksi kekerasan.
2. Kedua, konflik internal telah menyengsarakan masyarakat yang menjadi korban yang tidak berdaya akibat konflik, seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pengusiran.
3. Ketiga, konflik internal penting karena sering melibatkan negara-negara tetangga sehingga bisa menimbulkan konflik perbatasan. Pengungsi yang menyeberang ke negara tetangga atau pemberontakan yang mencari perlindungan ke negara

tetangga dapat menimbulkan permasalahan baru yang dapat memicu konflik bersenjata antar negara yang bertetangga.

4. Keempat, konflik internal penting karena sering mengundang perhatian dan campur tangan dari negara-negara besar yang terancam kepentingannya dan organisasi internasional (Hermawan, 2007;78.).

Sejak Rusia dipimpin oleh presiden Vladimir Putin, banyak kebijakan yang berbeda dari presiden sebelumnya yaitu Boris Yelstein, seperti tindakan Rusia yang menolak segala macam bentuk negoisasi terhadap kelompok separatis Chechnya. Negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat tanpa kita sadari dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita dan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan.

Negosiasi merupakan cara yang lebih baik dalam mencari solusi dibanding dengan sebuah pengadilan ataupun kekerasan. Untuk mendapatkan solusi terbaik, negosiasi dilakukan dengan menjalin hubungan yang baik dan dengan professional (Sunar, 2008;67)

Negosiasi menurut Suyud Margono adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka sedangkan negosiasi menurut H. Priyatna Abdurrasyid adalah suatu proses yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika ada pihak lain yang menguasai apa yang kita inginkan (2000;86).

1.4.2 Hipotesis

Berdasarkan dari permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

"Pada masa pemerintahan Vladimir Putin, Rusia mengeluarkan kebijakan yang *represif*, seperti kebijakan Vladimir Putin bahwa Rusia tidak akan pernah bernegoisasi kepada Chechnya dan perintah Putin untuk melumpuhkan para pemimpin *Separatis* Chechnya dengan cara apapun, sehingga mampu mempercepat pemulihan stabilitas keamanan dan ekonomi Negara Rusia."

1.4.3 Definisi Operasional

Berdasarkan hipotesis di atas maka terdapat beberapa definisi operasional yang terkait, yaitu:

1. Separatis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain) (http://id.wikipedia.org/wiki/Separatisme).
2. Represif adalah suatu tindakan yang menekan, mengekang, menahan atau menindas (www.kamusbesar.com/33080/represif).
3. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Termasuk di dalamnya, tindakan

yang dilakukan ketika berkomunikasi, kerjasama atau memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu (http://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi).

1.5 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif analitis yaitu: Membuat data-data dengan cara menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72).

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data Studi kepustakaan *(library research),* dengan mengumpulkan data dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan organisasi internasional terkait, buku-buku teks, makalah dan jurnal-jurnal yang mengenai masalah penelitian yang dilakukan oleh para ahli, serta penggunaan jasa internet melalui *website* yang berhubungan dengan penelitian yang di kaji, sehingga mendapatkan data-data tertulis yang dapat di dokumentasikan.

1.6.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.

1.6.2 Waktu Penelitian

Tabel 1.1

Tabel Kegiatan Penelitian (Agustus 2011 – Februari 2012)

No	Waktu / Kegiatan	2011																				2012				
		Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1	Pengajuan Judul																									
2	ACC Judul																									
3	Bimbingan																									
4	ACC UP																									
5	Sidang UP																									
7	Penelitian																									
8	Sidang Skripsi																									

1.6.3 Lokasi Penelitian

Untuk menunjang penelitian yang dilakukan, penulis akan mencari data dan bahan penulisan di beberapa tempat, antara lain:

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Bandung
2. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
3. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran.

4. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung.
5. Kedutaan Rusia di Jakarta, Jl.H.R.Rasuna Said Kav.X-7,1-2
6. LIPI, Widya Graha LIPI Lt.3 Jl. Jend Gatot Subroto 10, Jakarta
7. CSIS Jakarta, Jl. Tanah Abang III / 27

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan keperluan penelitian, secara sistematis penulisan ini ditulis sebagai berikut;

Bab I, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian.

Bab II, Tinjauan Pustaka, pada bab ini memaparkan teori-teori yang relevan dengan subjek yang diteliti. Tinjauan pustaka yang dijelaskan dalam bab ini berisi uraian tentang data sekunder yang diperoleh dari referensi buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah atau hasil penelitian. Teori-teori yang digunakan adalah teori HI, keamanan, separatism dan teori konflik dalam dinamika Hubungan Internasional khususnya Rusia Chechnya.

Bab III, Objek Penelitian, bab ini memberikan gambaran mendalam mengenai objek penelitian, yang berkaitan dengan judul karya ilmiah atau

permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, objek penelitian menyajikan tentang upaya Rusia dalam menekan separatisme Chechnya dengan tindakan represif.

Bab IV, Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah dan hipótesis serta menganalisis peranan Rusia dalam mengatasi separatisme Chechnya pada era Putin.

Bab V, Kesimpulan dan Saran, kesimpulan merupakan intisari hasil analisis dan interpretasi, cara penulisan/pembahasan dirumuskan dalam bentuk pernyataan secara ketata dan padat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Informasi yang disampaikan dalam kesimpulan ini bisa berupa pendapat baru, koreksi atas pendapat lama, pengukuhan pendapat lama atau menumbangkan pendapatlama. Saran merupakan kelanjutan dari kesimpulan, sering berupa anjuran yang dapat menyangkut aspek operasional maupun konseptual.